

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul.

Memilih judul merupakan, tahapan awal dalam membuat sebuah makalah atau karya tulis, karena dari yang pertama inilah yang akan menentukan hasil dari yang terakhir. Dan bukanlah suatu hal yang mudah untuk menggambarkan dan membicarakan tentang negara Iran, suatu negeri yang terletak dikawasan Timur Tengah ini adalah merupakan negeri yang penuh dengan cerita dalam setiap pemerintahannya dimana dalam setiap pemerintahannya pasti dipenuhi dengan pergolakan baik pergolakan secara intern maupun extern (pergolakannya dipengaruhi oleh negara lain).

Mengapa penulis mengatakan bahwa menulis negara Iran atau menulis tentang kawasan Timur Tengah bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, karena seperti yang telah diketahui bahwa hampir setiap negeri yang terdapat di kawasan ini hampir selalu mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat ketika kita akan mengkaji tentang sesuatu hal dari negeri tersebut.

Kawasan Timur Tengah adalah negeri yang panas, panas baik secara geografis maupun secara geopolitis, karena dikawasan tersebut adalah merupakan kawasan yang menjadi asal-usul agama *Samawi* (Islam, Kristen, dan Yahudi), memiliki keragaman etnis dan budaya, memiliki keanekaragaman orientasi / kesetiaan politik berkembangnya aspek ideologi dan selalu adanya persaingan

Negara-negara besar terhadap suatu pemerintahan negara di Timur Tengah¹. Dan negara Iran adalah merupakan salah satu kawasan yang menjadi asal-usul agama Islam sehingga sangat menarik untuk dikaji.

Negara Iran adalah merupakan suatu kawasan dimana Dinasti Qajar berkuasa, dimana dalam pendirian suatu dinasti pastilah sistem pemerintahan yang diberlakukan dalam negara itu adalah monarkhi² ataupun monarkhi konstitusional, dan sistem ini selama beratus-ratus tahun diberlakukan oleh dinasti tersebut, dan rakyat Iran harus bisa menerimanya.

Dan semakin maju zaman maka semakin berkembang pula pemikiran orang, begitu pula dengan rakyat Iran, dengan seiring berjalannya waktu maka teriring berganti-ganti pula sistem pemerintahan yang terdapat di negeri Iran, mulai dari monarkhi ke teokrasi dan dari teokrasi ke teodemokrasi seiring tuntutan zaman. Konsep pemerintahan teodemokrasi merupakan jalan tengah atau merupakan perpaduan dari dua konsep pemerintahan yaitu antara teokrasi dengan demokrasi. Teokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan ketuhanan dimana Iran menggunakan sistem ini karena sebagian besar rakyat Iran adalah orang beragama dan agama yang dianutnya adalah Islam, dan idiologi teokrasi ini dianut oleh kubu garis keras masyarakat Iran atau yang dikenal dengan nama kubu konservatif. Idiologi teokrasi memiliki pengertian bahwa kedaulatan tertinggi itu berada di tangan Tuhan dan bukan di tangan rakyat, sehingga segala macam

¹ Makalah pengantar diskusi dari Sidik Jatmika judul, " *Timur Tengah : Keanekaragaman dan Potensi Konflik*" dalam Pelatihan Kader Partai Keadilan di Tawangmangu, Jawa Tengah.

² Secara lugas dapat dikatakan bahwa definisi monarki adalah *-Mono*; satu, *Archien* :kekuasaan system kekuasaan dimana kepala negara atau kepala pemerintahan digantikan swecara turun temurun alias terbatas pada satu keluarga atau dinasti saja Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa, 1990) hal 500

peraturan dan norma-norma yang akan dibuat oleh majlis pemerintah haruslah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama..

Sedangkan konsep pemerintahan demokrasi ini lahir selain karena pengaruh dari nilai nilai yang berasal dari dunia barat juga faktor keduanya adalah karena generasi baru dari rakyat Iran yang pada waktu Revolusi Iran belum lahir sangat menginginkan agar idiologi ini diambil sebagai unsur pemerintahan karena didalam konsep pemerintahan demokrasi ini ada nilai-nilai kebebasan individu yang tidak terdapat dalam konsep pemerintahan teokrasi. Ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintahan atau rakyat Iran sendiri tidak tertutup dari gagasan politik baru dan sekaligus membantah tuduhan bahwa para tokoh Revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur kembali keabad pertengahan.

Dan dari kedua kubu inilah diambil jalan tengah yaitu teodemokrasi setelah melalui pergulatan dan perdebatan yang cukup memakan waktu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada satupun negara didunia ini yang masyarakat mayoritasnya muslim mampu untuk melakukan terobosan seperti yang dilakukan negara Iran. Dan negeri Iran ini bisa disebut juga sebagai kelinci percobaan pertama dalam mempraktekkan suatu idiologi yang belum pernah dilakukan dinegara lain. Dan apabila negeri Iran berhasil dalam masa-masa kritisnya untuk memberlakukan sampai dimasa yang akan datang terhadap idiologi ini maka akan membuat maju komunitas Islam diseluruh dunia dan seluruh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim tentu akan mencontohnya, khususnya negara kita Indonesia. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis buku ilmiah tentang negeri Iran

Konsep teodemokrasi sangatlah familiar apabila kita memahami arti, makna serta prakteknya akan tetapi terkadang apa yang disebutkan dalam teori belum tentu akan dilakukan dalam dunia praktisi, apalagi yang dihadapi dalam konsep ini adalah masyarakat yang sudah tentu memiliki sifat yang majemuk dan dinamis. Hal ini tentulah sangat menarik apabila kita dapat memprediksikan apa yang akan terjadi pada masyarakat Iran setelah menggunakan konsep ini sebagai dasar negara, karena pada dasarnya negara Iran adalah negara muslim yang pertama yang menggunakan ideologi ini dalam sistem pemerintahannya. Akan menjadi seperti apakah masyarakat apabila nilai-nilai teodemokrasi yang berisikan sedikit kebebasan ini diterapkan, akan menjadi majukah masyarakat tersebut atukah akan menjadi bangsa yang barbar karena tidak dapat mengontrol kebebasan tersebut. Wallahu'alam

Dengan melihat paparan diatas maka dengan menyebut nama Allah sebagai penguasa segala ilmu, penulis mencoba mengangkat judul "Prospek Demokrasi Dalam Pemerintahan Iran".

B. Tujuan Penulisan.

1. Untuk mempelajari kelanjutan dari sistem pemerintahan Iran sebagai negara muslim pertama yang melakukan terobosan baru.
2. Kiranya penyusunan skripsi ini memperkaya khasanah pengetahuan kita khususnya pada masalah sistem pemerintahan Iran.
3. Memperbaiki image dari negara Iran, bahwa negara Iran adalah negara yang mempunyai masa depan yang bagus bagi negara atau subyek internasional

yang ingin bekerja sama atau menanam saham di Iran, karena negara Iran sudah memiliki Politik Luar Negeri yang bersifat terbuka.

4. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar S1.

C. Latar Belakang Masalah.

Dari kawasan Timur Tengah ini saya akan mengadakan studi kasus mengenai sebuah negara yang berdiri karena adanya revolusi kekuasaan yang terjadi tepatnya pada bulan Desember tahun 1979. Negara tersebut adalah negara Iran, negara yang memiliki nama Persia pada zaman dahulu ini adalah termasuk negara yang penuh dengan konflik baik konflik internal (dalam pemerintahan) maupun eksternal (konflik dengan negara lain). Bangsa Iran yang pada masa sekarang telah terpengaruh dengan konsep atau paham globalisasi telah menjelma menjadi sebuah negara republik dengan nama Republik Islam Iran. Republik Islam Iran memiliki akar sejarah peradaban yang sangat tinggi dan lama.

Sebenarnya permasalahan pemerintahan yang menganut sistem kerajaan³ di Iran telah berlangsung sejak lama sekitar 25 abad lamanya dan mencapai puncak perubahan sistem pemerintahan yang semula menganut sistem kerajaan atau kekaisaran monarki⁴ menjadi sistem republik yang berdasarkan Islam pada awal abad ke 20 waktu pemerintahan Dinasti Pahlevi. Bangsa Iran telah mencapai

2. Pemerintahan dengan sistem kerajaan telah ada ditimur tengah sejak tahun 41H yaitu pada Dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Damaskus dari tahun 41H-132H dan pemerintahanya diawali oleh Mu'awiya bin Abi Sufyan. Lihat Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*" (Jakarta, Pustaka Zahra, 2002) hal 45.

3. Rasulullah saw pernah bersabda kepada kaisar Byzantium, Heraclius, dan Raja Iran bahwa pemerintahan monarki dan kekaisaran adalah pemerintahan yang memberikan pemaksaan kepada hamba Allah. Dan beliau mengatakan penerapan monarki dan kekaisaran melambangkan system pemerintahan yang jahat, sebagaimana desakan *Sayyidussy Syuhada* (pemimpin para Syahid, Imam Hussain) yang pernah bersabda. Lihat Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta

titik jenuh dengan pemerintahan sistem kerajaan yang merupakan semacam tempat perjuangan antara rakyat melawan penguasa karena merasa ditindas. Peradaban yang telah dibangun sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu menjadikan negeri Persia ini memiliki ciri dan karakter yang khas dimata dunia

Dengan luas wilayah sekitar 1.648.195 km² dikelilingi negara-negara dikawasan sekitar Asia dan Eropa seperti Turki, Rusia, Afganistan dan Irak menjadikan Iran sebagai suatu negara yang memiliki lokasi yang strategis. Batas-batas negara Iran terdiri dari 5170 km garis batas daratan dan 2150 km garis batas air⁵. Pada masa pemerintahan Dinasti Qajar sampai tahun 1925, Iran merupakan negara yang diibaratkan sebagai macan tak bergigi karena negeri ini berdiri dibawah kekuasaan Dinasti Qajar dalam arti negeri Iran pada waktu itu belum memiliki kedaulatan yang penuh dan jelas, walaupun secara teknis Iran pada waktu itu adalah negeri yang merdeka.

Pemerintahan Dinasti Qajar pun berakhir pada tahun 1925 dengan adanya kudeta dari Reza Khan. Kudeta Reza Khan yang berhasil tersebut telah menyebabkan berdirinya suatu pemerintahan baru dinegeri Iran yang dikenal dengan Dinasti Pahlevi pada tanggal 25 April 1925. Ketika pemerintahan Reza Khan berdiri, berbagai tumpuan dan harapan dari rakyat Iran menjadi satu yaitu agar Reza Khan membawa negeri Iran ini kearah yang lebih baik dibandingkan waktu dibawah naungan dari Dinasti Qajar, karena negeri ini telah memiliki kedaulatan yang penuh. Tetapi apalah mau dikata ternyata pendirian Dinasti Pahlevi yang dipimpin oleh Reza Khan ini bukanlah merupakan keinginan rakyat Iran, dalam arti pemerintahan Reza Khan ini bukanlah *the Dream Governance*

yaitu pemerintahan yang dimimpikan dan diinginkan oleh rakyat Iran karena sifat dari pemerintahan dari Reza Khan ini adalah otoriter dan aturan serta hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Reza Khan bersifat terlalu mengekang kebebasan dari rakyat Iran.

Akhirnya kekuasaan Reza Khan yang bersifat otoritarian tidak bertahan lama yaitu hanya selama 16 tahun (1925-1941) kekuasaan Reza berakhir karena ia dianggap membelot, Reza memerintah dengan kejam sehingga ia mati di pengasingan di Afrika Selatan, matinya sang Reza Khan ini dikarenakan rasa simpatinya yang mendalam dengan melakukan kerjasama terhadap gerakan Nazi German, padahal waktu itu yang menduduki Iran adalah Inggris dan Uni Soviet, dan Inggris dan Uni Soviet mengetahui bahwa Sang Reza Khan sangat mendukung terhadap gerakan Nazi German (waktu itu terjadi Perang Dunia II dimana Inggris dan Uni Soviet bersatu untuk memusnahkan Nazi), karena Reza Kahn bekerja sama dengan pihak German maka pemerintah Inggris dan Uni Soviet pun menangkap Reza Kahn, rakyat Iran tidak mendukung Reza ketika beliau ditangkap pihak Inggris dan Uni Soviet karena tindakannya yang sangat otoriter terhadap mereka sehingga tidak membela Sang Reza ketika Sang Reza akan dibawa ke pengasingan di Afrika Selatan dan meninggal disana. Lalu Inggris dan Uni Soviet menggantikan Sang Reza dengan alasan bahwa beliau memerintah dengan sistem tirani dengan sangat menindas rakyat dan sifat dari pemerintahannya adalah otoriter. Ini merupakan alasan yang sangat brilian dari pasukan Inggris dan Uni Soviet, sehingga dengan alasan tersebut tidak terjadi pergolakan oleh rakyat Iran yang menuntut kebebasan didalam negeri tersebut

Sang Reza digantikan oleh putranya Mohammad Pahlevi pada tahun 1941 oleh pihak Inggris dan Uni Soviet yang tidak senang dengan German. Pada waktu itu Mohammad Pahlevi baru mencapai umur 20 tahun dan belum mengerti tentang pemerintahan sama sekali sehingga ia hanya menjadi boneka dari Inggris dan Uni Soviet untuk menjalankan kepentingan mereka di wilayah Timur Tengah. Kekuasaan Shah Reza Pahlevi selama 38 tahun (1941-1979) telah membuat suatu kemunduran dalam nilai-nilai spiritual agama Islam yang melandasi kehidupan rakyat Iran. Setelah beberapa lama memerintah, Reza Pahlevi menunjukkan suatu sikap yang tidak pantas untuk dijadikan panutan bagi rakyatnya. Dia memiliki banyak permasalahan baik secara intern (dalam pemerintahannya sendiri) maupun secara ekstern (dengan pihak-pihak luar negeri), permasalahan tersebut baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Dimasa Syah Iran inilah pengaruh Amerika mulai merasuki dan menjamah keberbagai dimensi kehidupan pemerintah dan rakyat Iran. Amerika dengan politik standar gandanya⁶ dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara didunia mulai menjamah kehidupan politik dari Pemerintah Iran.

Sebenarnya awal kedatangan dari Amerika di Iran adalah karena undangan dari Syah Iran pada waktu itu, kedatangan Amerika yang pada waktu itu bertepatan akan meletusnya Perang Dunia kedua. Undangan kepada Amerika oleh Syah Iran tersebut adalah karena Syah Iran memerlukan bantuan dari hegemoni Amerika untuk mengusir atau mengurangi propaganda dan tekanan yang dilakukan oleh pihak Uni Soviet (Rusia) terhadap Iran, salah satu taktik yang

⁶ Untuk lebih jelasnya bisa baca buku dari Sidik Jambila " AS Dan Kambuk Demokrasi "

dimainkan oleh Rusia adalah dengan memberikan sokongan terhadap partai Tudeh di Iran yang pro-komunis. Dan salah satu jalan untuk melawan Rusia secara efektif adalah dengan mendatangkan negara-negara besar seperti Inggris atau Amerika Serikat

Dan hubungan antara Iran dengan barat, khususnya Amerika Serikat pada masa Syah Iran diperkuat lagi dengan bantuan militer dan ekonomi yang besar oleh Amerika dengan menggunakan doktrin Eishenhower pada tahun 1957 dan persetujuan pertahanan dengan Amerika pada tahun 1959. Kedekatan demi kedekatan yang telah dilakukan oleh Syah Iran terhadap Amerika Serikat telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dinegeri Iran termasuk aspek politik dan ekonomi. Semua bidang kehidupan Iran dikala itu menjadi terhegemoni oleh kekuasaan Amerika Serikat dan menjadikan Iran lambat laun mengalami ketergantungan ekonomi politik terhadap Amerika Serikat.⁷

Pada saat saat inilah Amerika Serikat menanamkan nilai-nilai kebebasannya yang terkenal dengan paham demokrasi ini kedalam negeri Iran.

Penanaman nilai-nilai demokrasi Amerika terhadap Iran telah mempengaruhi rakyat Iran sampai pada tahun sekarang, hampir seluruh rakyat Iran yang tidak menjadi saksi Revolusi Islam Iran berdiri sangat menginginkan agar nilai-nilai demokrasi segera ditegakkan karena mereka merasa nilai-nilai agama ditangan para mullah sangatlah membelenggu mereka. Perubahan sistem pemerintahan dari monarkhi ke teokrasi dan dari teokrasi ke teodemokrasi sangatlah mempengaruhi pemikiran dari rakyat Iran terhadap pemerintahan,

⁷ M. A. S. M. ...

ideologi teodemokrasi yang sedang dijalankan agendanya oleh Mohammad Khatami ini dirasa belum memberikan perubahan yang berarti di negeri Iran karena, dalam setiap kegiatan yang akan mensukseskan agenda dari kubu reformis ini, sang Presiden yaitu Muhammad Khatami selalu mendapat jegal dari kubu konservatif yang memegang mayoritas parlemen. Mungkin hal ini dapatlah dimaklumi dalam dunia perpolitikan ketika Mohammad Khatami mendapat halangan untuk menggulirkan program-program reformisnya dari kubu konservatif karena Mohammad Khatami telah mengalahkan jago dari kubu konservatif yaitu Ali Akbar Nateq Nouri secara mutlak dalam pemilihan Presiden Iran pada pemilihan tanggal 8 Juni 2001.

Presiden Iran bersama rakyat generasi ketiga Iran sangatlah menginginkan agar dalam era pemerintahan yang sistem pemerintahannya tidak berdasarkan teokrasi tetapi sudah menggunakan unsur demokrasi yaitu teodemokrasi ini tidak terlalu memasung kebebasan dari rakyat Iran. Yaitu dalam hal budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan berbagai penyegelan yang dilakukan oleh kubu konservatif terhadap fasilitas-fasilitas penyiaran radio, televisi dan media massa cetak.

Presiden Iran bersama generasi ketiga Iran mengkritik kebebasan di negerinya yang masih mengalami pemasungan. Menurut Khatami keterbukaan budaya, ilmu pengetahuan, dan fasilitas penyiaran radio, televisi dan media massa cetak yang tak terbatas merupakan simbol kemajuan suatu bangsa

“Namun sayang sebagian media cetak yang bisa terbit pada masa perang dulu (perang Irak-Iran) justru dibredel pada era keterbukaan ini ,” ungkapnya⁸.

Surat kabar merupakan salah satu media dan sarana bagi suara rakyat yang tidak dapat didengar oleh pemerintah, dengan membredel surat kabar berarti kubu konservatif telah mengingkari dari pendirian idiologi teodemokrasi dalam Negara Iran. Bahkan Sayyidina Ali pun menyatakan bahwa *“rakyat memiliki hak-hak terhadap pemerintahannya. Bagian dari hak tersebut adalah kebebasan memberi kritik dan saran”*

Pada saat ini kepemimpinan di Iran dipegang oleh para kaum Mullah yang memiliki basis cukup kuat dan memperoleh legitimasi dari agama sampai dikhawatirkan akan mengulang kembali kesalahan dari penguasa sebelumnya, dalam hal ini penulis mengkhawatirkan akan terjadinya peralihan despotisme.yang mana terjadi pada waktu dahulu (Reza Khan dan Syah Iran) adalah terjadi despotisme monarkhi, dan setelah terjadinya Revolusi Iran dan peralihan *Vilayat Al Faqih* beberapa kali ditakutkan akan terjadi suatu despotisme agama. Dalam hal ini dapat diambil pemahaman singkat bahwa akan terjadi peralihan despotisme dari despotisme monarkhi menjadi despotisme agama walaupun sudah menggunakan istilah pemerintahan teodemokrasi dalam sistem pemerintahan di Iran karena pengekanan dari para Mullah terhadap rakyat di Iran.

Despotisme agama itu sendiri akan lahir manakala agama (dalam hal ini adalah teks-teks agama yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah) tidak mampu

⁸ Murtadhi, Abd Rahman. "Juru Bicara Revolusi: Esensi dan tantangan dalam Reformasi Iran".

diterjemahkan oleh para pemuka agama terhadap suatu realitas sehingga akan terjadi *taqlid* dari rakyat terhadap para ulama yang tidak secara benar menelaah teks-teks agama. Perubahan kondisi dari masyarakat yang akan terus berjalan beserta dinamikanya harus disikapi secara cerdas dan baik. Mungkin menurut penulis tuntutan akan rakyat Iran akan "kebebasan" bukanlah merupakan suatu hal yang menakutkan selama para pemimpin di Iran mampu menunjukkan kearifannya. Kebebasan yang menurut penulis analisa dari berita-berita adalah dalam hal :

1. Kebebasan berpendapat.
2. Kebebasan dalam media dan budaya.
3. Peranan kaum wanita yang masih kecil.

Dari kebebasan-kebebasan yang dipaparkan dan diinginkan oleh para kaum reformis tersebut, di era pemerintahan yang sudah mengatasnamakan demokrasi ketuhanan di Iran ini, para Mullah masih belum mengabdikan atau masih belum mengendorkan cengkeraman kekuasaan mereka terhadap perihal diatas. Hal ini tentu saja menimbulkan pergolakan dan konflik yang cukup sengit didalam pemerintahan Iran, dimanakah letak nilai-nilai demokrasi apabila ulama selalu memaksakan agar rakyat Iran harus tunduk total pada pemikiran para Mullah tanpa diakui haknya sebagai makhluk yang berfikir. Walaupun Khomaeni mengklaim bahwa *Vilayat Al Faqih* merupakan adalah sesuatu yang bersifat final bagi Iran.

Kedua ulama Iran yaitu Khatami dan Montazeri sampai sekarang tetap memprotes proses pembekalan yang dilakukan oleh para mullah bagi Iran

Mereka berdua memprotes kebijakan yang diambil oleh para Mullah garis keras dengan cara mereka sendiri. Montazeri bersedia berkorban dalam tahanan rumah selama beberapa tahun sebagai konsekuensi keyakinannya bahwa para ulama sebaiknya memainkan peranan sebagai penasehat saja bukan sebagai pelaku politik yang cenderung bertindak berlebihan. Sedangkan Khatami memainkan peranan dalam dunia politik sampai terpilih menjadi presiden di Iran selama dua kali karena pensosialisasian pemikiran-pemikiran moderatnya dalam sebuah konsep Demokrasi Islam yang dimana pensosialisasian tersebut telah membuat pesona tersendiri bagi generasi ketiga di Iran. Sebagai konsekuensinya Khatami harus menghadapi kenyataan pahit karena kubu garis keras tanpa ragu melakukan balas dendam politik dengan korban berjatuhan dipihak kubu reformis dari menteri kabinet hingga intelektual reformis.⁹

Perseteruan antara kedua kubu tersebut telah membuat gonjang-ganjing pemerintahan di Iran, rakyat Iran semakin resah dengan ketidakbebasan dan pengekangan yang dilakukan para Mullah. Apabila kejadian konflik terus menerus berlangsung ditakutkan akan terjadi pegolakan ataupun kemungkinan yang lain yaitu revolusi kedua yang dilakukan oleh generasi ketiga Iran walaupun itu adalah kemungkinan terburuk dengan adanya ketidaknyamanan yang terjadi didalam negeri tersebut

D. Pokok Permasalahan.

Dari argumen yang disampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka untuk meneliti perihal teodemokrasi atau demokrasi ketuhanan di negeri Iran muncul sebuah pertanyaan :

⁹Rahmang Cipto, "Dinamika Politik Iran" (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004) hal 105

“Bagaimanakah prospek atau kecenderungan demokrasi dalam sistem pemerintahan *Vilayat Al Faqih* di Iran?”

E. Kerangka Dasar Teori.

Teori adalah bentuk penyelesaian paling umum yang memberitahukan pada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi teori juga menjadi dasar bagi prediksi. Dari pengertian diatas secara gambling teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, teori memegang posisi kunci yaitu sebagai alat analisis dan sebagai alat prediksi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu negara. Dalam hal ini fungsi dari teori adalah sebagai kaca mata untuk melihat dan memperjelas suatu fenomena agar dapat dengan mudah untuk dikaji oleh seseorang. Dan penulisan skripsi ini didasarkan atas kerangka teori demokrasi. Teori demokrasi sebetulnya bukanlah suatu konsep politik modern tentang pengaturan negara, tata kehidupan masyarakat, dan hak-hak masyarakat bernegara, akan tetapi nilai-nilai dari demokrasi tersebut telah mendarah daging pada masyarakat Yunani pada masa dahulu dan telah menjadi nilai-nilai yang dianut oleh seluruh masyarakat dunia pada masa sekarang.

Teori demokrasi pada saat sekarang ini dirasakan berasal dari dunia barat, khususnya Amerika karena negara tersebutlah yang telah menjunjung tinggi dan menggembor-gemborkan keseluruh dunia tentang teori demokrasi agar seluruh negara didunia ikut menganutnya. Paham ini memiliki pengertian dengan mengemudikan orang-orang dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang

sesungguhnya, yaitu sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terhadap suatu keputusan yang telah atau akan diambil oleh pemerintah karena keputusan yang telah diambil oleh pemerintah tersebut sudah tentu akan berimbas kepada rakyat

Dunia barat memiliki hegemoni tentang konsep demokrasi ini dalam pemerintahan yaitu suara mayoritas rakyat merupakan perwujudan dari suara Tuhan (*people voice as the infinite voice*). Konsep demokrasi biasanya dilaksanakan dengan sistem perwakilan didalam pemerintahan. Kajian teoritis-konseptual tentang demokrasi mulai bergaung ketika terjadi transisi kedemokrasi yang mulai marak pasca perang dunia kedua, ketika banyak rezim otoritarian tumbang dari kursi kekuasaannya.

Secara etimologis konsep demokrasi berasal dari bahasa Yunani, kata demokrasi berasal dari dua suku kata yaitu yang pertama adalah *demos* yang berarti adalah rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang memiliki arti pemerintahan jadi kata demokrasi apabila diartikan secara keseluruhan memiliki arti pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat¹⁰.

Dalam *Declaration of Independence of America* kata demokrasi memiliki arti suatu pemerintahan yang dilakukan Dari rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat. Bagi rakyat, demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi dimana warga negara atau rakyat memiliki kontrol yang efektif terhadap kebijakan dari pemerintah, adanya pemerintah yang bertanggung jawab, adanya kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, musyawarah yang rasional dan didukung

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, hal. 1252

dengan informasi yang cukup, partisipasi dan kekuasaan yang setara dan berbagai kebijakan warga negara lainnya¹¹.

Selanjutnya kesempatan itu menurut Robert A. Dahl mungkin hanya bisa diperoleh / mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat bisa menjamin adanya delapan kondisi yaitu

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi.
2. Kebebasan mengungkapkan pendapat.
3. Hak untuk memilih dalam pemilihan umum.
4. Hak untuk menduduki jabatan publik.
5. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara.
6. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif.
7. Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung kepada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.¹²

Menurut Robert A. Dahl dia mendefinisikan demokrasi sebagai "*Political freedom of speak, publish, assemble and organize*" jadi demokrasi menurut A. Dahl adalah suatu kebebasan politik untuk berbicara, berorganisasi dan kebebasan pers. Dalam negara berdemokrasi setiap orang memiliki kesempatan untuk berekspresi berdasarkan hak-haknya sebagai warganegara, baik hak untuk berbicara, maupun hak untuk berorganisasi. Negara seminimal mungkin menjauhi campur tangannya yang berlebihan terhadap apa hak setiap warga negara.

¹¹ Samuel P. Huntington, "*Gelombang Demokratisasi Ketiga*" (Jakarta, Grafiti Pers, 2000).

¹² Samuel P. Huntington, "*Demokrasi Ketiga*" (Jakarta, Grafiti Pers, 2000).

Dalam sistem pemerintahan, sistem demokrasi hanya mengurus masalah duniawi atau pemerintahannya saja dan tidak menyinggung sedikitpun tentang masalah keagamaan ataupun kehidupan setelah kita mati. Konsep ataupun pemahaman demokrasi dalam penerapannya tidak mengacu kepada landasan agama untuk mempertimbangkan keputusan maupun kegiatannya.

Demokrasi dalam artian barat hanyalah sebagai sebuah sistem pemerintahan saja dan sebagai mekanisme kerja suatu pemerintahan yang berdasarkan atas AZAS kerakyatan. Bagi orang-orang dari dunia barat, antara agama dan negara perlu dipisahkan peranannya, setiap bidang mempunyai peranannya sendiri-sendiri. Seseorang yang berkecimpung dalam dunia agama tidak boleh mengurus pemerintahan ataupun negara, begitu juga sebaliknya dan apabila terjadi hubungan diantara keduanya atau ada campur tangan agama terhadap urusan negara maka menurut mereka akan terjadi kesimpangsiuran dan ketidakteraturan dalam sistem pemerintahan suatu negara.

Suatu negara untuk bisa memperoleh iklim demokrasi dalam pemerintahan biasanya melakukan :

Yang pertama pergerakan untuk merombak suatu bentuk pemerintahan dengan yang demokratis. Maksudnya adalah bahwa apabila sistem pemerintahan yang telah ada dan dirasakan oleh rakyat belum memunculkan situasi demokratis, perlu diadakan perombakan agar dalam sistem pemerintahan tersebut mencerminkan adanya distribusi kekuasaan yang merata. dimana rakyat tidak selalu diajak dalam pengambilan suatu keputusan, maka jadi tempat di mana

Keterlibatan warganegara atau rakyat dalam suatu negara dalam konsep demokrasi telah diatur yaitu dengan adanya lembaga-lembaga dalam pemerintahan, yang dimana fungsi dari pendirian lembaga-lembaga diatas adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ketiga lembaga tersebut adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga penyelenggara pemerintahan tersebut harus memiliki kedudukan dan kekuasaan yang setara sehingga mencerminkan distribusi kekuasaan yang merata dalam suatu negara, dan dapat saling mengawasi sehingga ketika ada suatu kebobrokan yang terjadi dalam suatu lembaga maka dapat segera diketahui dan segera disembuhkan.

Dalam konteks negara yang akan dibahas dalam karya tulis ini yaitu Iran, meskipun ketiga cabang tersebut memiliki kedudukan yang seimbang namun ternyata ada satu hal yang dicermati yaitu ketiga cabang tersebut berada dibawah kekuasaan Imam atau pemimpin spiritual. Dalam hierarki kekuasaan yang ada dalam struktur pemerintahan Iran, posisi Imam adalah yang tertinggi, suatu kenyataan bahwa adanya tuntutan dari rakyat Iran agar kekuasaan Imam yang sedemikian besar bisa dikurangi sedikit demi sedikit sehingga bisa menyesuaikan dengan keinginan dari rakyat Iran dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai agama Islam.

Yang kedua adalah penerapan sistem demokratisasi. Sistem demokrasi memunculkan adanya mekanisme pemerintahan *Check and Balance* atau adanya keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan artinya setiap penyelenggara pemerintahan harus sesuai dengan prinsipnya masing-masing satu sama lain

tidak boleh saling mempengaruhi (konotasi dalam arti yang negatif) dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan yang berujung pada ketidakmaksimalan dalam bekerja.

Seperti diketahui bahwa kekuasaan Imam sangatlah besar pengaruhnya terhadap belum maksimalnya fungsi *Chek and Balance* dalam pemerintahan. Hal ini yang seperti dikeluhkan oleh Khatami bahwa selama dia menjadi presiden dia merasa belum mampu bekerja secara optimal yaitu dalam mensukseskan agenda-agendanya, hal ini disebabkan dia tidak memiliki wewenang yang cukup dan selalu dirusuhi oleh pihak-pihak konservatif. Hal ini dikatakan dan diakui secara jujur oleh Khatami didepan forum pertemuan tahunan ke 3 Komite Pengawas Konstitusi pada tanggal 26 November 2000 bahwa dirinya selama 3,5 tahun menjabat presiden tanpa memiliki otoritas yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan konstitusi.

Yang ketiga adalah pendemokrasian maksudnya adalah peningkatan pelaksanaan nilai-nilai yang bersifat demokratis dalam negara seperti keterbukaan pemerintah, kebebasan individu, persamaan hak, dan partisipasi warganegara secara aktif.

Untuk menjawab fenomena permasalahan bagaimana prospek atau kecenderungan *Vilayat Al Faqih* dalam sistem pemerintahan demokrasi Iran menggunakan teori demokrasi menurut Huntington, menurut Huntington "Mengapa negara-negara bergerak ke sistem demokrasi dan menahkanya

sistem lama yang telah digunakan selama bertahun-tahun”, Huntington memberikan jawaban: ¹³

1. Banyak negara yang bergerak ke sistem demokrasi (mengalami demokratisasi) merasa terpuruk karena menderita kehancuran ekonomi dan krisis basis material yang lainnya, yang biasa digunakan untuk membayar loyalitas apparatus pemerintah dan kelompok loyalis dalam masyarakat
2. Krisis ekonomi diperparah oleh ketidakmampuan rezim dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu menghantar rezim keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada titik ini rezim mengalami pengkolapsan dan kesempatan pengempuran cukup terbuka lebar.
3. Pada kesempatan berikutnya rezim atau pemerintahan yang ada dituntut untuk memberikan dan membuka partisipasi masyarakat dalam politik. Pada tingkat ini rezim atau pemerintahan yang ada menjadi tidak berdaya .
4. Faktor-faktor lainnya yang turut terlibat dalam menggiring Negara-negara nondemokratik ke demokrasi adalah pengaruh ekspansi komunikasi global, kejatuhan harga minyak OPEC, kehancuran ideologi Marxisme-Leninisme (terutama dinegara-negara blok komunis) dan efek penggulingan rezim otoritarian pada negara-negara lain.

Serangkaian pra asumsi yang melatarbelakangi gerakan ke demokratisasi tersebut ditunjang oleh beberapa faktor krusial mengapa transisi ke demokrasi itu terjadi :

¹³ Gregorius Sedana, "Jalan Transisi Demokrasi Pada Sekelompok Negara Berkembang", Bandung: Edulita

Pertama, Sistem pemerintahan tidak memiliki konstruksi institusi yang kuat sebagai mekanisme untuk mengatasi krisis .

Kedua Rezim otoritarian tidak mampu melakukan institusionalisasi krisis sebagaimana dalam sistem demokrasi yang mampu mengelola krisis menjadi kepentingan public (*Public Interest*)

Ketiga, Sifat dan watak pemerintah yang terlalu kaku dan rigid tidak kondusif untuk peradaban masyarakat modern yang banyak dikendalikan oleh teknologi dan ilmu pengetahuan terutama yang berasal dari dunia barat..

Keempat, Sistem otoritarian atau pemerintah tidak mampu lagi menjawab setiap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, dan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Kelima, Pemerintah kehilangan mekanisme mempertahankan diri dari berbagai gesekan eksternal, terutama ekspansi komunikasi global (dimana isu-isu demokratisasi disalurkan) yang dengan gencar menyuarakan demokratisasi.

Keenam, Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa sistem demokrasi merupakan sebuah jawaban bagi rakyat yang berada dalam masalah dengan pemerintah karena pemerintah tidak mampu untuk menyejahterakan rakyatnya.

Dengan argumen yang terakhir ini, maka jelas bahwa kebaikan sistem demokrasilah yang menjadi penyebab banyak negara didunia ini beralih ke demokrasi Didalam salah satu bukunya, Huntington pun mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang memberikan warna terhadap proses demokratisasi dalam masyarakat yaitu¹⁴:

¹⁴ ...

- Level kekayaan yang tinggi dalam bidang ekonomi.

Level kekayaan yang tinggi dalam bidang ekonomi dapat dibilang sebagai salah satu factor yang memberikan warna dukungan terhadap proses demokrasi pada suatu Negara Seperti pendapatnya Seymour Martin Lipset, Huntingtonpun menekankan bahwa level kekayaan yang tinggi dalam bidang ekonomi pada suatu Negara merupakan factor pendukung. Semakin tinggi pembangunan ekonomi di suatu Negara, semakin tinggi pula kemungkinan munculnya demokratisasi dinegara tersebut. Hampir semua negeri kaya adalah negeri demokratis dan hamper semua negeri demokratis adalah negeri kaya.¹⁵

- Distribusi pendapatan atau kekayaan yang sama.

Adanya distribusi pendapatan atau kekayaan yang sama dalam sebuah Negara, akan mempengaruhi tindakan suatu masyarakat dalam menerima adanya paham demokrasi, karena adanya kesenjangan yang terlalu tajam akibat tidak adanya distribusi pendapatan atau kekayaan yang sama akan menimbulkan kecemburuan social. Dari sikap kecemburuan social inilah maka tingkat ekstrimisme akan meningkat sehingga akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penerimaan idiologi atau niali-nilai daridemokrasi.

- Pembangunan ekonomi dan modernisasi sosial.

Dalam poin ini akan dijabarkan bahwa semakin tinggi pembangunan ekonomi di suatu Negara, semakin tinggi pula kemungkinan munculnya demokratisasi dinegara tersebut. Fenomena ini terjadi karena semakin tinggi kemakmuran suatu Negara, maka akan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya. Hal ini

akan mendorong munculnya demokratisasi yang akhirnya akan mengubah Negara tersebut menjadi Negara demokrasi. Dan dukungan dari modernisasi sosial akan semakin membuat nilai-nilai demokrasi akan semakin tumbuh subur, karena modernisasi social berarti akan membuat suatu masyarakat pada suatu daerah akan berubah apabila tidak ingin merasa terkucilkan dari pergaulan global.¹⁶

- Adanya rentetan kelas menengah (*a string middle class*)

Kelas menengah adalah merupakan awal dari adanya kaum borjuis, dapat dikatakan bahwa kaum borjuis adalah pemimpin dari kelas menengah, dengan semakin banyaknya kelas menengah maka kehadiran dari kaum borjuis akan semakin exist, dan kehadiran dari demokrasi akan semakin kuat karena didukung oleh kaum borjuis.

- Level pendidikan dan tingkat buta huruf pada suatu negara.

Huntington menyatakan tingkat literasi pada suatu Negara akan mempengaruhi tingkat demokratisasi, hal ini dikarenakan literasi ini digunakan sebagai media untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi melalui buku, atau pemikiran-pemikiran orang barat yang mendukung demokrasi, melalui media seperti buku inilah maka orang akan mengerti tentang arti deokrasi tersebut.

- Adanya Globalisasi dan Westernisasi.

Globalisasi dan westernisasi dapat dikatakan adalah factor yang utama dalam mengantarkan paham demokrasi keseluruh penjuru dunia, dengan adanya teknologi yang bertambah canggih suatu Negara super power mampu untuk

membuat rakyat disuatu Negara untuk mengakses demokrasi sebagai idiologi negaranya walaupun secara pelan dan bertahap.

- Ketidakhadiran (tidak adanya) feodalisme dalam masyarakat.

Menurut Huntington, variabel bebas yaitu ketidakhadiran (tidak adanya) feodalisme dalam masyarakat suatu Negara akan sangat membantu bagi tumbuhnya atau adanya ndemokrasi pada suatu Negara, dapat dilihat faktanya bahwa feodalisme yang dgerakkan oleh kaum bangsawan atau kaum feodal sangat anti terhadap kaum borjuis, dimana kaum borjuis atau kaum kapitalis adalah m,erupakan ujung tombak bagi tumbuhnya demokratisasi pada suatu Negara.

- Rendahnya tingkat kekerasan dalam masyarakat.

Perubahan-perubahan politik yang besar hampir selalu melibatkan penggunaan kekerasan gelombang demokratisasi ketiga tidak terkecuali. Hampir setiap demokratisasi yang terjadi antara tahun 1974 dan 1980 melibatkan penggunaan kekerasan, namun secara keseluruhan tingkat kekerasan tidaklah tinggi. Karena terjadi melalui kompromi dan pemilihan umum, kebanyakan demokratisasi gelombang ketiga berlangsung relative damai bila dibandingkan dengan transisi rezim tipe yang lain. Kekerasan dalam bidang politik melibatkan orang-orang yang melakukan pengrusakan fisik terhadap orang atau harta benda dalam rangka mempengaruhi susunan atau perilaku pemerintah.¹⁷

- Pengalaman sebagai sebuah koloni Inggris.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sebagai koloni Inggris adalah merupakan daerah dari iaian Inggris. Huntington menyatakan bahwa dari penelitian yang

dilakukannya terhadap Negara-negara dunia ketiga, hampir semua Negara-negara didunia yang pernah merasakan jajahan dari Inggris atau sebagai sebuah koloni Inggris akan memiliki kontribusi untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi.

- Rendahnya tingkat polarisasi politik dan ekstrimisme.

Pada intinya rendahnya polarisasi politik dan ekstrimisme akan mempengaruhi tingginya tingkat demokratisasi, karena tingginya tingkat polarisasi politik dalam suatu negara akan menambah factor gesekan antar elite politik dan pola tindakan ekstrimisme pun akan meningkat dari kalangan bawah dalam usahanya untuk membela pemimpinnya.

- Adanya pemimpin politik yang menjalankan nilai-nilai demokrasi.

Pemimpin politik pada suatu Negara adalah subyek yang akan menentukan atau yang paling menentukan suatu Negara akan menjadi seperti apa. Dapat dikatakan pemimpin politik adalah sebagai sopir dalam sebuah bus yang dimana tujuan dari bus tersebut adalah kemakmuran dan kesejahteraan bagi para penumpangnya. Apabila tujuan dari pemimpin politik tersebut adalah demokrasi maka seluruh rakyat yang dipimpinnya akan mengikuti selama masih menguntungkan.

- Adanya tradisi toleransi dan kompromi.

Tradisi toleransi dan kompromi adalah merupakan salah satu tindakan yang mencerminkan adanya sikap mendukung demokrasi karena dengan adanya sikap tersebut, berarti dalam suatu kelompok masyarakat dalam Negara ada sikap untuk mengakui adanya hak dan kewajiban orang lain.

- Adanya pendudukan oleh kalangan asing yang pro-demokrasi

Pendudukan oleh kekuasaan asing yang prodemokrasi, apalagi dalam jangka waktu yang lama pada suatu Negara akan memengaruhi tatanan nilai yang ada dan berlaku pada suatu Negara, selain karena kondisi pemaksaan, Negara yang diduduki tersebut mau tidak mau harus menganut ideologi demokrasi, hal ini terjadi karena Negara yang diduduki oleh kekuasaan asing tersebut dalam kondisi yang lemah atau tidak sebanding dengan kekuasaan asing yang menduduki Negara tersebut.

- Adanya pengaruh dari kekuasaan asing yang prodemokrasi.

Pengaruh dari kekuasaan asing yang prodemokrasi apalagi terhadap Negara-negara dunia ketiga, karena kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan yang terjadi dinegara mereka (Negara dunia ketiga) membuat Negara tersebut mencari nilai-nilai yang lebih baik yang akan membuat atau menciptakan kondisi yang akan memberikan kesejahteraan atau kemakmuran untuk diri mereka sendiri (rakyat).

- Adanya keinginan untuk menandingi negara-negara demokrasi.

Poin ini adalah merupakan salah satu variable bebas untuk memahami perilaku suatu negara dalam memakai istilah demokrasi dalam negaranya. Suatu negara karena ingin menandingi negara lain atau melebihi negara lain maka memakai demokrasi sebagai pendekatan utamanya, karena pada era sekarang dapat dilihat bahwa hampir semua negara didunia ini memakai istilah demokrasi sebagai ideologi negaranya karena terbukti bahwa demokrasi dapat membawa kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat dalam hal pembangunan negara.

- Adanya tradisi untuk mencontohi kultur dan HAM

Adanya tradisi penghargaan terhadap hukum dan HAM adalah merupakan salah satu unsure dalam demokrasi. Karena Negara demokrasi adalah merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama (mufakat). Sedangkan tradisi penghargaan terhadap HAM adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak individu, karena secara keseluruhan korelasi antara eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu adalah sangatlah tinggi. Bahkan adanya sejumlah kebebasan merupakan komponen essential dari demokrasi.¹⁸

- Adanya homogenitas dalam hal etnis, ras dan agama.

Arti dari homogenitas adalah kesatuan atau kesamaan dalam satu jenis, dalam hal ini apabila dalam suatu Negara terdapat suatu kesatuan atau kesamaan yang besar baik dalam hal agama, ras, maupun etnis akan menumbuhkan sikap persatuan secara intern. Kesatuan itu dapat merupakan sebuah sikap untuk merubah perilaku pemerintah yang arogan karena telah mengekang dari kebebasan dari mereka (rakyatnya), dari pengekangan inilah awal perlawanan rakyat terhadap pemerintah dalam rangka untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi.

- Ada tidaknya konsensus atas nilai-nilai politik dan social.

Adanya konsensus atas nilai-nilai politik social, menandakan bahwa adanya musyawarah, dan musyawarah berarti menandakan adanya pengakuan atas adanya hak orang lain dalam nilai-nilai politik dan social. Apabila pemerintahan dalam suatu Negara melakukan consensus atas kebijakan yang akan diambilnya berarti dalam Negara tersebut telah ada nilai demokrasi. Semakin seringnya

consensus atas nilai politik dan social diambil maka berarti demokrasi telah memberikan arti warna baru dalam pemerintahan tersebut.

- Adanya kaum borjuis yang banyak, mengutip (Teori dari Barrington Moore “No Borjuise, No democracy”).

Dalam point ini akan dijabarkan bahwa kehadiran kelas menengah yang kuat dan banyak di Iran akan sangat mendukung kehadiran dari demokrasi. Berdasarkan penelitian di Eropa (Inggris) Kaum borjuis menjadi pelopor utama gerakan demokratisasi. Dan kehadiran kaum borjuis menjadi indicator demokrasi pada suatu Negara, apabila jumlah kaum borjuis di Iran ada dan jumlahnya banyak maka hal tersebut akan mendukung kehadiran demokrasi di Negara tersebut.

- Adanya pengembangan dari kontestasi politik dan perluasan partisipasi politik.

Pengembangan dari kontestasi politik dan perluasan partisipasi politik dari suatu Negara merupakan bukti bahwa pemerintahan yang ada disuatu Negara tersebut merupakan benar-benar mewakili rakyatnya selama partisipasi politik tersebut tidak dikekang. Poin ini mewarnai demokrasi, apabila pengembangan dari kontestasi politik dan perluasan partisipasi politik pada suatu Negara semakin besar maka warna dari demokrasi akan semakin cerah, karena poin partisipasi politik merupakan salah satu unsure bahwa demokrasi itu benar-benar ada dan dilaksanakan.

Dari 20 faktor yang menentukan demokrasi suatu negara yang diidentifikasi oleh Huntington, kenyataan yang dihadapi oleh pemerintah Iran

adalah ada dari faktor-faktor diatas yang mempengaruhi sistem pemerintahan di Iran, yang membuat pemerintahan di Iran mengalami kegoncangan.

F. Hipotesa

Konsep demokrasi akan mengalami kondisi perish apabila para mullah tetap memiliki kekuasaan yang absolut untuk menyatakan mana yang boleh dan mana yang tidak didalam negara, akan tetapi dengan banyaknya faktor-faktor yang mendukung demokrasi, baik yang bersifat ekstern maupun intern maka demokrasi akan tetap terwujud walaupun tidak sebebaskan dunia barat mengingat bahwa penafsiran agama terhadap konsep demokrasi dari waktu ke waktu tidak terbatas selama masih memiliki sifat kebenaran Islam .

G. Metode Penelitian.

Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan ini penulis berharap nantinya bisa menemukan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Sumber data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai literatur, buku, laporan penelitian, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi in adalah eksplanasi dan prediksi, dalam artian skripsi ini akan mencoba memberikan penjelasan dan meramalkan atau memperkirakan bagaimana kecenderungan atau prospek *Milwat Al Faqih*

H. Jangkauan Penelitian.

Dengan maksud agar pembahasan tidak terlalu meluas dan penyelesaiannya menjadi lebih kongkrit, maka penulis akan memberikan batasan terhadap penelitian ini. Penulis akan membahas seputar konflik yang terjadi pada masa-masa presiden Iran dalam usaha untuk menegakkan demokrasi di Iran, dan seputar permasalahan dengan *Vilayat Al Faqih* dengan kubu reformis tentang prinsip kebebasan, pemahamannya, dan bagaimana penegakkannya di Iran yang dimana masalah ini telah mendapat perhatian di dunia internasional khususnya negara-negara muslim dan yang mayoritasnya muslim. Serta seputar tindakan-tindakan yang dilakukannya, bagaimana kecenderungannya (*Vilayat Al Faqih*) dalam sistem pemerintahan yang sudah mendapat nilai-nilai demokrasi yang dimana tindakan yang diambil oleh para ulama tersebut sangat mempengaruhi proses pemerintahan di Iran.

I. Sistematika Penulisan.

Dengan maksud untuk membahas permasalahan ini secara sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi 5 (lima) bagian. dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan mengenai pokok-pokok penting dalam penulisan sebuah skripsi, yang meliputi: alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode

BAB II KONSEP NEGARA IDEAL DI IRAN

Dalam bab II ini penulis akan sedikit berbicara tentang apakah konsep Syi'ah itu, bagaimanakah perkembangan Syi'ah,. Bagaimanakah konsep negara menurut pandangan Imam Khomeini sehingga mendapatkan suatu gambaran tentang bagaimanakah supaya negara Islam yang ideal di Iran itu terwujud.

BAB III ERA DEMOKRASI MEMASUKI NEGERI IRAN

Bab ini akan membahas mengenai konsep demokrasi, bagaimana asal mulanya, faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam perkembangannya di Iran, bagaimana terjadinya pertalian antara teori ini dengan teori teokrasi. Serta bagaimanakah penerapan idiologi teodemokrasi dalam pemerintahan Iran sebagai upaya jalan tengah antara kubu konservatif yang memegang teguh prinsip-prinsip revolusi Iran dengan kubu reformis yang menginginkan adanya sedikit kebebasan dalam negara Iran dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Islam..

BAB IV KECENDERUNGAN DAN PROSPEK DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN *VILAYAT AL FAQIH*

Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini, yaitu mengenai bagaimanakah kecenderungan demokrasi dalam pemerintahan Iran, apakah tindakan-tindakan yang diambil para mullah di Iran merupakan penerapan dari nilai-nilai *Syara'*, ataukah ada keinginan yang lain dari para Mullah ini. Bagaimanakah kecenderungannya (para Mullah) dimasa depan apakah

kehadirannya akan tetap *exist* seperti diwaktu ada Imam Khomeini dan terjadi Revolusi Iran, ataukah akan berkurang sifat dari kekuasaanya sesuai dengan bergantinya generasi di Iran karena tuntutan dari rakyat yang menginginkan demokrasi, kebebasan dan ditambahi dengan adanya faktor globalisasi dunia.

BAB V KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal bab.